BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Sejarah Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Gedung Sate didirikan pada 27 Juli 1920, gedung ini awalnya memang dibangun sebagai pusat pemerintahan pada saat itu dimana Pemerintahan Belanda menetapkan Kota Bandung sebagai ibu kota negeri jajahannya di Indonesia. Pemilihan Kota Bandung didasarkan pada pertimbangan iklim yang cocok karena Kota Bandung begitu sejuknya ditambah pemandangan alam yang indah. Konon, iklim Kota Bandung saat ini senyaman Prancis Selatan di Musim panas.

Dengan penetapan pusat pemerintah itu, maka dibangunlah Gedung Sate atau Gouvernements Bedrijven sebutannya di masa itu dengan perencanaan yang dibuat secara matang oleh suatu tim yang diketuai Kolonel Purnawirawan V.L. Slors, beranggotakan antara lain Ir. J. Berger, arsitek muda kenamaan lulusan Fakultas Teknik Delft Nederland, Ir. Eh. De Roo dan In G. Hendriks serta pihak "Gemeete van Bandoeng".

Tim bertugas merencanakan dan membangun berbagai gedung perkantoran yang merupakan pindahan dari keseluruhan departemen dan instansi lainnya yang berjumlah 14 dari Batavia (Jakarta) ke Bandung, termasuk pembangunan komplek perumahan untuk menampung sekitar 1500 pegawai pemerintahan. Setelah berhasil disusun perancanaan pembangunan GB, dilakukan peletakan batu pertama gedung "GB" pada

tanggal 27 Juli 1920 oleh Johana Catherina Coops, putri sulung Walikota Bandung B. Coops dan Petronella Roelofsen, mewakili Gubernur Jenderal di Batavia.

Pembangunan Gedung Sate melibatkan sekitar 2000 pekerja, 150 orang diantaranya pemahat atau ahli bongpay pengukir batu nisan dan pengukir kayu berkebangsaan Cina yang berasal dari Konghu atau Kanton. Selebihnya adalah tukang batu, kuli aduk, dan peladen yang merupakan pekerja bangunan yang berpengalaman menggarap Gedong sirap (Kampus ITB) dan Gedong papak (Balai Kota). Mereka adalah pendudukan dari kampung Sekeloa, Coblong, Dago, Gandok, dan Cibarengkok.

Selama kurun waktu empat tahun lamanya, di awal tahun 1924 berhasil diselesaikan Kantor Pusat PTT kemudian dilanjutkan dengan pembangunan induk bangunan utama GB yang tuntas dikerjakan pada September 1924 termasuk bangunan perpustakaan.

Arsitektur Gedung Sate

Berdasarkan data, gaga arsitektur Gedung Sate merupakan hasil pemilihan Pemerintah Belanda terhadap usul rancangan desain para arsitek yang diajukan untuk pembangunan pusat pemerintahan Belanda di Indonesia. Saat itu, terpilih karya arsitek Ir. J. Berger dan kelompoknya yang bernuansa wajah arsitektur tradisional nusantara. Pilihan itu tidak lepas dari masukan pendapat maestro arsitek Belanda Dr. Hendrik Petrus Berlage.

Tidak heran, banyak kalangan arsitek dan ahli bangunan baik di Indonesia menyatakan Gedung Sate adalah bangunan monumental yang anggun mempesona dengan gaya arsitktur yang unik. Seperti yang diungkapkan Cor Pashier dan Jan Wittenberg, dua arsitek Belanda, langgam arsitektur adalah gaya hasil eksperimen sang arsitk yang mengarah pada bentuk gaya arsitktur Indo Eropa (IndoEuropeeschen architectuur Stijl).

Gaya arsitektur Gedung Sate menurut Cor Pashier, merupakan pencarian bentuk atau langgam baru yang memadukan wajah timur dan barat yang ditopang teknik konstruksi maju dari negeri barat. Tidak mustahil bila keanggunan Candi Borobudur ikut mewarnai Gedung Sate.

Pendapat ini datang dari D. Ruhl yang terangkum dalam bukunya "Bandoeng en haar Hoogvlakte (1952)". Ia berpendapat, Gedung Sate adalah bangunan terindah di Indonesia *(het mooiste gebouw van Indonesie).*

Maestro arsitek Belanda Dr. H.P. Berlage juga menyebutkan rancangan GB atau Gedung Sate suatu karya arsitektur yang besar. Komentarnya saat mengunjungi Gedung Sate pada April 1923, Gedung Sate mengingatkan pada gaya arsitektur Italia di masa *renaissance* terutama bangunan sayap barat. Sedangkan menara bertingkat di tengah bangunan mirip atap meru atau pagoda. Ini merupakan ungkapan arsitektur yang berhasil memadukan langgam Timur dan Barat secara harmonis.

Sementara arsitek Slamet Wirasonjaya menyatakan, bangunan Gedung Sate tergolong karya arsitektur yang utuh dan khas. Gaya

arsitekturnya bukan eklitis (gaya campuran) seperti bangunan Capitol Hill di Washington.

Bagaimana bangunan yang megah seperti Gedung Sate dapat berdiri. Tentunya dapat dibayangkan bagaimana kerja keras tim yang memang terdiri dari para arsitek brilian dan ahli bangunan berpengalaman.

Ir. Hartoyo Kunto dalam bukunya Balai Kota Agung Bandung (1995) mengungkapkan, proses perencanaan dan pembangunan Gedung Sate di tahun 1920 merupakan pesona teknologi bidang kontruksi yang menakjubkan, mengingat sampai saat ini bangunan tersebut masih tetap kuat dan utuh, juga penuh daya pesona estetika arsitektur yang tak lekang oleh jaman.

Pembangunan ini merupakan proyek kerja kontruksi yang besar menurut ukuran jamannya. Kendati proses pembangunannya masih menggunakan cara konvensional dengan materi bangunan lokal dan mengerahkan buruh bangunan yang cukup banyak, namun kualitas dan hasil ciptaannya sangat mengagumkan.

Dari data teknis, kontruksi bangunan Gedung Sate memang menggunakan cara konvensional, lebih banyak memakai batu alam dan bata dibanding kontruksi beton. Meskipun demikian, proses pembangunannya ditangani secara profesional dengan memperhatikan standar teknik, material bangunan yang tepat menurut aturan dan ketentuan.

Kuat dan utuhnya Gedung Sate hingga kini, memang karena dinding gedung terbuat dari kepingan batu ukuran besar yang diambil dari kawasan

perbukitan batu di Bandung Timur, sekitar Arcamanik dan Gunung Manglayang. Kepingan batu itu berasal dari bongkahan alam yang digali kemudian dipotong menurut ukuran yang diperlukan. Kepingan batu berukuran 1x1x2 meter yang berjumlah ri-buan itu diangkut ke Cihaurgeulis dengan kereta gantung menuruni perbukitan Bandung Utara, lalu dibawa dengan lori menuju lokasi pembangunan.

Setelah selama empat tahun dibangun dengan melibatkan sekitar 2000 pekerja, berhasil dibagun kantor PTT dan bangunan induk Gedung Sate. Sedangkan pembangunan pusat pemerintahan Belanda di Indonesia tidak tuntas mengingat resesi ekonomi dunia yang terjadi.

Gedung Sate berdiri diatas lahan seluas 27.990.859 m^2 luas bangunan 10.877.734 m^2. Terdiri dari basement 3.039.264 m^2, lantai I 4.062.533 m^2, teras lantai II 212.976 m^2, menara 121 m^2 dan teras menara 205.169 m^2.

Usai dibangun pada September 1924, Gedung Sate yang semula memang diperuntukan bagi Departemen Lalu Lintas dan Pekerjaan Umum, digunakan oleh Jawatan Pekerjaan Umum. Dalam perjalannya, pada jaman perang kemerdekaan tepatnya 3 Desember 1945, terjadi peristiwa yang memakan korban tujuh orang pemuda. Mereka gugur saat mempertahankan Gedung Sate dari serangan pasukan Gurkha.

Untuk mengenang ketujuh pemuda itu, dibuatlah tugu dari batu yang diletakkan di belakang halaman Gedung Sate. Pada tanggal 3 Desember 1970, tugu batu ini kemudian dipindahkan ke halaman depan Gedung Sate atas perintah Menteri Pekerjaan Umum.

Gedung Sate Sebagai Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

Setelah sekian lama menjadi pusat kegiatan Jawatan Pekerjaan Umum, sejak tahun 1980 Gedung Sate menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat setelah pindah secara bertahap dari Gedung Kertamukti di Jl. Braga Bandung.

Gedung Sate kemudian juga dikenal dengan sebutan Kantor Gubernur, karena Gedung Sate kemudian juga dikenal dengan sebutan "Kantor Gubernur" karena sebagai pusat kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan ruang kerja Gubernur terdapat di lantai II bersama ruang kerja Wakil Gubernur.

Gedung ini dibangun pada tahun 1989 dan hingga kini dikenal dengan sebutan "Gedung Baru". Di bagian timur dan barat terdapat ruang besar yang akan mengingatkan kita pada ruang dansa (ballroom) yang sering terdapat pada bangunan masyarakat Eropa.

Ruangan ini diperindah dengan masing-masing dua buah lampu gantung yang indah. Tidak diketahui secara jelas, kedua ruangan besar ini pada masa kolonial Belanda dipergunakan untuk kegiatan apa. Namun sejak menjadi pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, ruang yang lebih dikenal dengan sebutan Aula Barat dan Aula Timur ini sering dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan resmi. Di sekeliling kedua aula ini, terdapat ruangan-ruangan yang ditempati beberapa biro dengan stafnya.

Ada satu lantai lagi yang terletak di paling atas. Lantai yang biasa disebut menara Gedung Sate ini tidak dapat dilihat dari bawah. Menuju

lantai teratas Gedung Sate ini bisa dilakukan dengan menggunakan lift atau dengan menaiki tangga kayu. Lift di lantai dasar yang dibuat pada tahun 1988, dimaksudkan untuk memudahkan para tamu resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan wisatawan lain menuju menara Gedung Sate.

Ada satu lagi gedung yang "menemani" Gedung Sate. Seiring dengan perkembangan pemerintah di Indonesia, pada tahun 1977, lapangan hijau di sebelah barat Gedung Sate dibangun gedung yang mengambil sedikit gaya arsitektur Gedung Sate namun dengan gaya konstektual.

Gedung yang diarsiteki oleh Ir. Sudibyo ini, diperuntukan bagi kegiatan para pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif daerah.

1.2. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

1.2.1. Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Visi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013 adalah sebagai berikut :

"Tercapainya Masyarakat Jawa Barat Mandiri, Dinamis, Dan Sejahtera"

Dasar Hukum :

1. UU No. 25 th. 2004 – tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. UU No. 32 th. 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Perda No. 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025.
4. Peraturan Gubernur No. 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat.

Penjabaran makna dari Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut :

A. Mandiri

Mandiri adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis e-government, energi, infrastruktur, lingkungan dan sumberdaya air.

B. Dinamis

Dinamis adalah sikap dan kondisis masyarakat Jawa Barat yang secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam proses pembangunan.

C. Sejahtera

Sejahtera adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.

1.2.2. Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Misi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing.

Tujuan :

1. Mendorong masyarakat ke arah peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kompetensi kerja.
2. Menjadikan masyarakat Jawa Barat yang sehat, berbudi pekerti luhur serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran :

1. Tuntasnya program pemberantasan buta aksara.
2. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah.
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak.

4. Meningkatnya pelayanan sosial dan penanggulangan korban bencana.
5. Meningkatnya kesetaraan gender.
6. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja.
7. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.
8. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama.
9. Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal.

Tujuan :

Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal.

Sasaran :

1. Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal.
2. Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja.

3. Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing.
4. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja.
5. kebutuhan pangan masyarakat.

3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah.

Tujuan :

Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya.

Sasaran :

1. Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa.
2. Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.
3. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Jawa Barat.

4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah).
5. Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur.

4. Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.

Tujuan :

Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

Sasaran :

1. Terkendalinya pertumbuhan, pertambahan jumlah serta persebaran penduduk.
2. Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan, dan resiko bencana.
3. Meningkatnya fungsi kawasan lindung Jawa Barat.
4. Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan. Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan serta energi terbaharukan diantaranya panas bumi, angin, dan surya.

5. Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi.

Tujuan :

1. Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel.
2. Mewujudkan kehidupan demokrasi dan terpeliharanya semangat kebangsaan.

Sasaran :

1. Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi.
2. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.
4. Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan.
5. Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah.
6. Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7. Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan;
8. Meningkatnya peran dan fungsi partai politik.

9. Menguatnya peran masyarakat madani dalam kehidupan politik.
10. Tumbuhnya pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1.3. Lambang dan Arti Lambang Daerah Provinsi Jawa Barat

Lambang dan arti lambang daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1

Lambang Daerah Provinsi Jawa Barat



Sumber : Arsip Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2012

Arti Lambang Daerah Provinsi Jawa Barat

Lambang berbentuk bulat telur, bentuk ini berasal dari bentuk perisai yang banyak dipakai oleh laskar-laskar kerajaan zaman dahulu :

KUJANG

- Gambar pokok
- Sebuah alat serbaguna yang sangat dikenal disetiap rumah tangga sunda
- Jika perlu dapat dipergunakan sebagai alat penjaga diri
- 5 lubang melambangkan Lima Dasar Negara "Pancasila"

PADI

- Melambangkan pangan yang merupakan bahan makanan pokok di Jawa Barat
- Jumlah padi 17 melambangkan hari ke 17 dari bulan Proklamasi

KAPAS

- Melambangkan sandang
- Jumlah kapas 8 buah melambangkan bulan ke 8 dari tahun Proklamasi
- Padi dan Kapas pada dasar hijau melambangkan kesuburan dan kemakmuran tanah Jawa Barat

GUNUNG

- Bagian terbesar dari daerah Jawa Barat adalah pegunungan

SUNGAI DAN PERKEBUNAN

- Melambangkan sungai, terusan dan saluran air yang banyak terdapat di daerah Jawa Barat

SAWAH DAN PERKEBUNAN

- Jumlah sawah terbesar di seluruh daerah Jawa Barat
- Perkebunan berada di bagian tengah dan selatan daerah Jawa Barat

DAM DAN BENDUNGAN

- Usaha dan pekerjaan di bidang irigasi merupakan salah satu pekerjaan yang mendapat perhatian, mengingat sifat agraris daerah Jawa Barat

GEMAH RIPAH REPEH RAPIH

- Sebuah pepatah lama dikalangan Sunda yang menyatakan bahwa yang padat yang rukun dan damai

1.4. Biro Humas, Protokol, dan Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Tahun 2009, maka ditetapkan bahwa Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu :

"Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera Tahun 2013".

Untuk mendukung visi dan misi tersebut, maka Biro Humas, Protokol dan Umum berupaya menempatkan posisi pelayanan untuk membangun performance Jawa Barat dengan menetapkan Visi Biro Humas, Protokol dan Umum Tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut :

"Penyelenggaraan Pelayanan Prima Kepada Pimpinan, Aparatur dan Masyarakat"

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelayanan informasi internal dan eksternal serta publikasi.

2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi protokol, tata usaha serta pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah.
3. Menyelenggarakan, koordinasi dan fasilitasi pemantauan serta evaluasi administrasi telekomunikasi dan sarana telekomunikasi.
4. Menyelenggarakan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi, pelayanan rumah tangga pimpinan dan rumah tangga sekretariat daerah.

Perumusan misi tersebut dengan mencakup ruang lingkup kerja Biro Humas Protokol dan Umum, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Biro Humas, Protokol dan Umum meningkatkan orientasi kerja aparatur dalam penyelenggaraan Ketatausahaan, pengaturan jadual acara pimpinan melaui koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta mengurus kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Biro Humas, Protokol dan Umum sebagai fungsi pelayanan terhadap pimpinan dan aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat berusaha meningkatkan pelayanan kebutuhan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.
3. Biro Humas, Protokol dan Umum sebagai pelayanan kehumasan berupaya melaksanakan penyelenggaraan informasi, dokumentasi, pemberitaan bagi pimpinan, aparatur dan publik secara cepat, tepat, dan akurat.

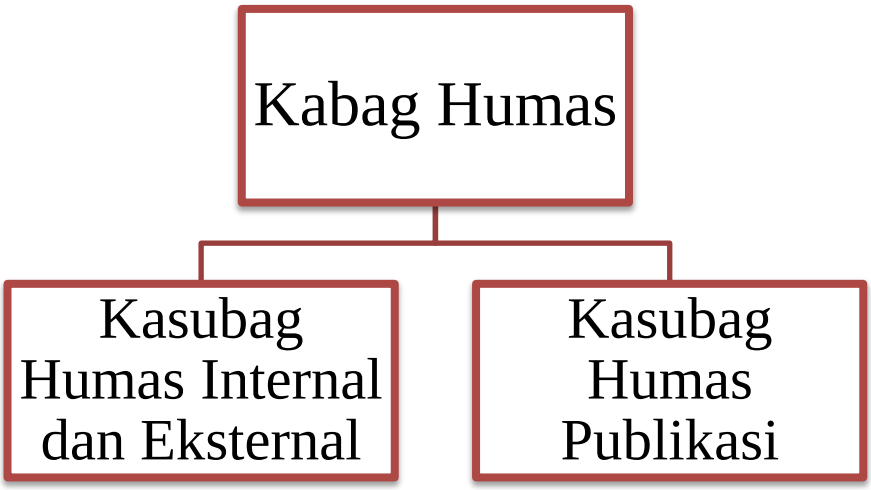
4. Biro Humas, Protokol dan Umum memberikan pelayanan sandi, dan telekomunikasi bagi pimpinan dan aparatur dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan secara cepat dan tepat.

1.5. Struktur Organisasi Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Struktur Organisasi Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Bagian Humas



Sumber : PERDA PROVINSI JAWA BARAT NO. 20 TAHUN 2008

Bagian Hubungan Masyarakat dikepalai oleh Kepala Bagian Humas yang membawahi dua Kepala Sub Bagian yang pertama Kepala Sub

Bagian Humas Internal dan Eksternal dan kedua Kepala Sub Bagian Humas Publikasi.

Masing-masing Kepala Bagian Humas dan Kepala Sub Bagian Humas memiliki tugas pokok, fungsi dan rincian tugas tiap bagian masing-masing yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 29 Tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi, rincian, tugas unit dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat .

1.6. Job Description Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Adapun tugas pokok, fungsi dan rincian tugas tiap bagian Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi pelayanan informasi internal dan eksternal dan publikasi.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :
    a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum pelayanan informasi internal dan eksternal serta publikasi
    b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelayanan informasi internal dan eksternal serta publikasi
    c. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi pelayanan informasi internal dan eksternal serta publikasi.

3. Rincian Tugas Bagian Hubungan Masyarakat :

   a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bagian Hubungan Masyarakat
   b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum kehumasan
   c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pelayanan informasi internal dan eksternal
   d. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi publikasi.
   e. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kehumasan, meliputi pelayanan informasi internal dan eksternal, publikasi, dokumentasi dan pemberitaan
   f. Menyelenggarakan pemeliharaan akurasi informasi dan dokumentasi
   g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
   h. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota
   i. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bagian Hubungan Masyarakat
   j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
   k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Hubungan Masyarakat membawahkan :

a. Subbagian Pelayanan Internal dan Eksternal
b. Subbagian Publikasi

Adapun tugas pokok, fungsi dan rincian tugas masing-masing adalah :

a. Tugas pokok Subbagian Pelayanan Internal dan Eksternal melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi pelayanan informasi internal dan eksternal.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Pelayanan Internal dan Eksternal mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan umum pelayanan informasi internal dan eksternal
b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan informasi iternal dan eksternal
c. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelayanan informasi internal dan eksternal.

Rincian tugas Subbagian Pelayanan Internal dan Eksternal :

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Pelayanan Internal dan Eksternal
2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penerangan, pemberitaan dan dokumentasi

3. Melaksanakan penyampaian bahan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik dan media luar ruang
4. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerangan, pemberitaan, dokumentasi dan pendistribusian informasi
5. Melaksanakan pengelolaan bahan penerangan dan pemberitaan
6. Melaksanakan akurasi informasi
7. Melaksanakan pelayanan informasi internal dan eksternal
8. Melaksanakan pengelolaan bahan dokumentasi
9. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
10. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Pelayanan Internal dan Eksternal
11. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Tugas pokok Subbagian Publikasi melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi publikasi.

   Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Publikasi mempunyai fungsi :

   a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan umum publikasi
   b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi publikasi

c. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi publikasi.

Rincian Tugas Subbagian Publikasi :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Publikasi
b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum publikasi
c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi publikasi melalui media cetak, elektronik dan media luar ruang
d. Melaksanakan penyusunan bahan publikasi dan dokumentasi
e. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
f. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Publikasi
g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelayanan informasi internal dan eksternal serta publikasi

1.7. Sarana dan Prasarana Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Sarana dan prasarana Humas Pemeritah Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Sarana dan Prasarana Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat

No.	Sarana	Jumlah
1.	Meja Rapat	20
2.	Meja Kerja	26
3.	Kursi Kerja	26
4.	Komputer	10 unit
5.	Laptop	5 unit
6.	Mesin Tik	5 unit
7.	Mesin Fotokopi	1 unit
8.	Printer	4 unit
9.	Foto-Foto Besar	± 50 buah
10.	Lemari Berkas	± 25
11.	Televisi	2 unit
12.	Kamera Digital	5
13.	Kamera Liputan	4
14.	Handycam	2
15.	Dispenser	3
16.	Telepon	4
17.	Meja Komputer	10
18.	Handy Talkie (HT)	8

No.	Prasarana	Jumlah
1.	Ruang Humas internal dan eksternal	1
2.	Ruang Humas Publikasi	1
3.	Press Room	1
4.	Aula	2
5.	Ruang Tamu	2
6.	Ruangan Editing	1

Sumber : Arsip Bidang Sarana dan Prasarana Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2012

1.8. Lokasi & Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

1.8.1. Lokasi Praktek Kerja Lapangan

Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan di Bagian Humas pada Biro Humas, Protokol dan Umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No. 22 Bandung.

1.8.2. Waktu Praktek Kerja Lapangan

Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan pada tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 10 Agustus 2012 dengan waktu hari kerja Senin s/d Jum'at pukul 07.00 – 16.00 WIB.